

ABSTRAK

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 122/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari sebelumnya 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tanggapan WPOP terhadap kebijakan baru pemadanan NPWP ke NIK. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat informan dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Prosedur pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WPOP merasa khawatir terkait kebijakan tersebut dikarenakan WPOP belum mengetahui tentang manfaat yang didapat. Sehingga dalam kemunduran implementasi ini pemerintah lebih memperdalam sosialisasi terhadap masyarakat tentang manfaat pemadanan dan pemahaman tentang jaminan akan tidak terjadinya kebocoran data.

Kata Kunci: Wajib Pajak, Orang Pribadi, NIK, NPWP

ABSTRAC

Changes regulated in Minister of Finance Regulation (PMK) Number 136 of 2023 concerning Amendments to PMK Number 122/PMK.03/2022 concerning NPWP of Individuals, Corporate Taxpayers and Government Agency Taxpayers. The Directorate General of Taxes (DJP) of the Ministry of Finance extended the full implementation of the Population Identification Number (NIK) as a Taxpayer Identification Number (NPWP) from January 1 2024 to July 1 2024. This research aims to explore WPOP's response to the new policy of matching NPWP to NIK. This research uses descriptive qualitative methods. There were four informants used in this research with several predetermined criteria. Data collection procedures use observation, interview and documentation techniques. The research results show that WPOP is worried about this policy because WPOP does not yet know about the benefits obtained. So that in this implementation setback, the government is deepening outreach to the public about the benefits of matching and understanding about guarantees that data leaks will not occur.

Keywords: *Taxpayer, Individual, NIK, NPWP*